

BAB I

PENDAHULUAN

1. KONTEKS PENELITIAN

Kondisi lingkungan di Indonesia tidak seijau dulu lagi, degradasi hutan terjadi di mana-mana. Degradasi hutan atau kerusakan sumber daya hutan Indonesia terjadi karena paradigma pembangunan yang bercorak sentralistik yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata dan didukung oleh instrumen hukum yang represif (Nurjaya, 2005: 36). Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat dan kebiasaan melakukan perdagangan ilegal tidak selalu dapat dipersalahkan, karena yang bisa memberikan solusi untuk permasalahan lingkungan ialah lembaga pemerintah juga lembaga non-pemerintah (Garrard, 2012: 21).

Dikutip oleh Tempo pada terbitan beritanya di bulan Mei 2014, bahwa Ketua Balai Taman Nasional Tesso Nilo menggelar operasi gabungan untuk membongkar kebun kelapa sawit ilegal yang tumbuh di area Taman Nasional Tesso Nilo. Pengusaha saat itu tidak melawan, namun mirisnya tanaman kelapa sawit yang berada di area tersebut memiliki kisaran umur 5 sampai 10 tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak mengambil tindakan apapun untuk mencegah tumbuhnya perkebunan ilegal dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun selama pohon kelapa sawit tersebut tumbuh. Balai Taman Nasional Tesso Nilo bahkan menemukan pula kasus pembalakan liar yang membuat 1.534 hektar lahan Taman Nasional tersebut gundul. Dalam terbitan beritanya pada Desember 2013, Tempo mengutip WWF Indonesia bahwa hasil penghitungan mereka

memperlihatkan terdapatnya 13,5 juta hektar kelapa sawit yang tumbuh di negeri ini. Angka tersebut melebihi data di Kementerian Pertanian yang mencatat bahwa Indonesia memiliki 9,2 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit. Artinya, ada 4,3 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit ilegal yang telah tumbuh di Indonesia. Pembangunan kebun kelapa sawit ini menjadi ancaman besar bagi lahan perhutanan di Indonesia.

Bukti tersebut sesuai dengan perkataan Susilo (2008: 53) bahwa manusia ialah makhluk penakluk lingkungan. Seiring perkembangan zaman, kini manusia tidak lagi tunduk pada batasan-batasan alamiah. Kecerdasan manusia dapat menghadirkan kekuatan yang membuat mereka mampu untuk merombak alam sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Berkaitan dengan kemampuan ini, manusia juga seharusnya bisa bertanggung jawab akan segala kerusakan yang timbul atas apa yang telah mereka perbuat. Untuk itu, manusia membutuhkan apa yang disebut dengan *sustainable society* atau masyarakat berkelanjutan dan *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan.

Menurut Capra (dalam Susilo, 2008: 185) *sustainable society* ialah masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhannya tanpa mengurangi kesempatan bagi generasi-generasi masa mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan *sustainable development* (dalam Susilo, 2008: 186) ialah hasil perjanjian di Rio De Janerio pada 1992 yang merancang pengelolaan lingkungan yang tidak sekedar mencakup wilayah individual, namun harus terikat terhadap sistem sehingga menjadi ruh bagi setiap kebijakan-kebijakan negara.

Selain itu, menurut Emil Salim (dalam Susilo, 2008: 187), pembangunan berkelanjutan ini memiliki ide dasar bahwa proses pembangunan harus berlangsung secara kontinu dengan ditopang oleh sumber daya alam. Tetapi, harus pula disadari bahwa sumber alam ini memiliki ambang batas. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya bertujuan untuk menghargai lingkungan, namun juga memperhitungkan keberlanjutan di mana generasi-generasi penerus dapat diwarisi sumber daya alam yang memadai. Takashi merumuskan (dalam Susilo, 2008: 189) bahwa *sustainable development* berkaitan dengan keperluan ekonomi, kebutuhan manusia, dan kebutuhan lingkungan. Maka untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan ini dibutuhkan dukungan dari pemerintah.

Lembaga implementasi menyadari bahwa proyek-proyek lingkungan seringkali memiliki keterbatasan karena inovasi dan solusi yang mereka tawarkan tidak sepenuhnya dimengerti oleh orang-orang yang membutuhkannya (Oepen, 1999: 8). Di tengah permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini, banyak kalangan masyarakat yang mengharapkan perubahan agar kehidupannya menjadi lebih baik. Namun, solusi yang ditawarkan para penguasa belum tentu bisa dimengerti oleh mereka, sehingga hal ini menjadi masalah bagi para inisiator yang berusaha membuat inovasi dan menemukan solusi atas berbagai permasalahan lingkungan. Dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan, dibutuhkan proses komunikasi berupa kerjasama dan interaksi baik di dalam institusi, maupun dengan berbagai aktor penting dari masyarakat itu sendiri.

Menurut Oepen (1999: 8), adanya keterbatasan dalam mencari jalan keluar dari permasalahan lingkungan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

“Pertama, para peneliti di bidang lingkungan percaya bahwa fakta ilmiah dan kepentingan ekologis merupakan keharusan sebagai sesuatu yang dapat dipercaya. Namun, masyarakat melihatnya berdasarkan emosi, sosialisasi, alasan, dan pengetahuan yang mereka pahami. Kedua, seringkali kata-kata dan penggambaran atas solusi atas sebuah permasalahan dipahami masyarakat sebagai ekspektasi yang berlebihan. Sehingga mereka menganggap apa yang diucapkan telah terselesaikan tanpa mempedulikan hambatan komunikasi yang ada, yakni sesuatu yang diucapkan belum tentu didengar; sesuatu yang didengar belum tentu dimengerti; sesuatu yang dimengerti belum tentu diterima; dan sesuatu yang diterima belum tentu dapat diselesaikan. Ketiga, terjadi konflik atas kepentingan yang diperjuangkan antara pemegang kepentingan dan pemegang saham.” (Oepen, 1999: 8)

Selain itu, permasalahan komunikasi juga menyebabkan terbatasnya implementasi untuk memperbaiki lingkungan. Menurut Oepen (1999: 8), komunikasi holistik dan sistematis yang dapat mempengaruhi persepsi orang banyak masih jarang dipertimbangkan dengan baik. Masyarakat masih relatif banyak yang tidak begitu peduli atas kontribusinya terhadap pencemaran lingkungan dari kendaraan pribadi yang dipakainya, walaupun mereka mengetahui bahwa penggunaan fasilitas transportasi umum bisa mengurangi polusi udara. Mereka memahami bagaimana lingkungan dapat tercemar juga bagaimana cara menanggulangnya namun masih ragu untuk mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari jika mempertimbangan efisiensi waktu dan kemudahan yang didapat dari kendaraan pribadi.

Oepen (1999: 8) juga mempertimbangkan bentuk komunikasi massa yang seringkali digunakan searah dari atas ke bawah dengan mengabaikan partisipasi publik melalui media komunitas. Banyak komunitas yang menunjukkan kepeduliannya dengan menggunakan media komunitas sebagai wadah penyampaian informasi penting bagi publik. Sebagai contoh, jurnal-jurnal yang

diterbitkan oleh Walhi tidak memiliki tempat publikasi di media massa yang memiliki cakupan pasar lebih besar. Sehingga informasi mengenai permasalahan lingkungan dan solusinya seringkali tidak dapat dicapai oleh masyarakat.

Oepen (1999: 8) juga melihat bahwa sebenarnya masih terdapat banyak orang yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan dan memperbaiki lingkungan, hanya saja mereka tidak tahu bagaimana cara menyusun strategi komunikasi yang baik sehingga jarang ada investor yang tertarik pada proyek lingkungannya. Aktivistis REDD+ misalnya, mereka memiliki proyek untuk melakukan konservasi hutan dengan cara yang telah mereka susun, namun kesulitan dalam mendapatkan izin konsesi dari pemerintah karena rencananya masih kurang dimengerti. Oleh sebab itu, usaha untuk mencari solusi bagi permasalahan lingkungan hanya menjadi pembicaraan yang terbatas pada beberapa kalangan saja.

Pemahaman mengenai komunikasi lingkungan menjadi penting sebagai dasar usaha dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Komunikasi lingkungan ialah proses komunikasi yang direncanakan secara strategis dalam penciptaan produk media sehingga apa yang dihasilkan dapat memengaruhi kebijakan wewenang, partisipasi publik, dan pelaksanaan proyek yang mendukung keberlanjutan lingkungan (Oepen, 1999:8). Tanpa memahami bagaimana kerusakan lingkungan menjadi bagian dari permasalahan sosial yang membutuhkan sentuhan komunikasi secara terencana dan strategis, usaha untuk berinovasi juga menemukan solusi atas permasalahan lingkungan akan terus berjalan di tempat.

Salah satu negara yang memiliki kawasan hutan terluas di dunia ialah Indonesia. Area hutan tropis basah atau *tropical rain forrest* Indonesia tercatat sebagai yang terluas kedua di dunia (Nurjaya, 2005: 35). Berdasarkan Luas Penetapan Kawasan Hutan yang dilansir Departemen Kehutanan Indonesia tahun 2005, Indonesia tercatat memiliki hutan dengan jumlah total sebesar 93,92 juta hektar persegi. 32,36 juta ha hutan tersebut terdapat di Papua, kemudian 28,23 juta ha terdapat di Kalimantan, 14,65 juta ha di Sumatra, 8,87 juta ha di Sulawesi, 4,02 juta ha di Maluku, 3,09 juta ha di Jawa, serta 2,7 juta ha di Bali dan Nusa Tenggara.

Dari jumlah keseluruhan kawasan hijau tersebut, pemanfaatan hutan dibagi ke dalam beberapa jenis: 88,27 juta ha difungsikan sebagai hutan tetap, 15,37 juta ha sebagai hutan konservasi, 22,10 juta ha sebagai hutan lindung, 18,18 juta ha sebagai hutan produksi terbatas, 20,62 juta ha sebagai hutan produksi tetap, 10,69 juta ha sebagai hutan produksi yang dapat dikonversi, dan 7,96 juta ha sebagai area penggunaan lain.

Departemen Kehutanan Indonesia mencatat bahwa jumlah area hutan di negara ini berangsur-angsur menurun setiap tahunnya. Pada 1950, Indonesia memiliki 162 juta ha hutan. Angka tersebut merosot menjadi 118,7 juta ha pada 1992 dan 110,0 juta ha pada 2003. Penurunan kuantitas kawasan hijau ini didominasi oleh terjadinya konversi lahan perhutanan menjadi perkebunan, peternakan, dan industri lainnya.

“Sejak tiga dekade terakhir ini kawasan hutan di Indonesia mengalami degradasi dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini selain karena jumlah penduduk yang mengandalkan hutan sebagai sumber penghidupan terus meningkat dari tahun ke tahun, juga

karena pemerintah menjadikan hutan sebagai sumber pendapatan dan devisa negara yang paling diandalkan setelah sumber daya alam minyak dan gas bumi.” (Nurjaya, 2005: 35)

Eksplorasi sumber daya hutan telah memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dijalankan antara lain melalui kebijakan konsesi Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pemungutan Hasil Hutan, atau Hutan Tanaman Industri (Nurjaya, 2005: 34). Dengan kebijakannya, pemerintah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menyerap tenaga kerja, meningkatkan devisa negara, dan meningkatkan pendapatan penduduk asli daerah. Namun begitu, dari segi ekologi, pemberian konsesi tersebut merugikan karena menimbulkan kerusakan sumber daya hutan yang tereksploitasi tanpa kendali dan tak terawasi.

Pada zaman penjajahan belanda, hutan jati di pulau Jawa dan Madura mengalami degradasi yang cukup signifikan. Penyebabnya, kayu hasil hutan ini banyak digunakan sebagai bahan baku kapal-kapal dagang yang berlayar di bagian utara pulau Jawa (Nurjaya, 35: 37-38). Terbukti bahwa hasil hutan selalu memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Di samping hal-hal tersebut, data statistik Departemen Kehutanan Indonesia serta berita-berita terkait besarnya luas hutan Indonesia memperlihatkan bahwa beberapa kasus lain mengenai perusakan hutan masih berulang kali terjadi sampai saat ini—salah satunya kebakaran hutan di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau (Kompas.com, Taman Nasional Tesso Nilo Sering Terbakar, 19 April 2013). Di Kalimantan, perusahaan-perusahaan—seperti industri kelapa sawit—juga masih terus membuka hutan untuk menciptakan lahan perkebunan baru (Tempo

Interaktif, Sinar Mas Tolak Bertanggung Jawab Atas Pembukaan Hutan Primer, 29 Juli 2010). Beberapa dari pemilik perusahaan tersebut mengaku bahwa mereka membuka lahan dari hutan yang telah terdegradasi dan selalu berupaya untuk tidak merusak lahan hutan primer.

Permasalahan-permasalahan hutan Indonesia tersebut dibahas sebagai salah satu subjek krusial dalam film dokumenter karya James Cameroon dan Jerry Weintraub yang diberi judul "*The Years of Living Dangerously*". Film ini mengangkat substansi mengenai perubahan iklim secara global. Penyebab utama perubahan iklim itu ialah menembusnya unsur-unsur karbon ke lapisan atmosfer (*The Years of Living Dangerously*, 2014). Pada umumnya, banyak pihak menduga pencemaran karbon ini disebabkan oleh masifnya emisi kendaraan bermotor di berbagai belahan dunia. Padahal, pada kenyataannya pencemaran tersebut justru dipicu oleh banyaknya sektor perhutanan yang mengalami kerusakan di bumi ini—contohnya, kebakaran hutan yang berulang kali terjadi di Montana, Amerika, dan degradasi yang terjadi di Indonesia.

Sebagai media yang populer saat ini, film dianggap dapat memberikan pengaruh besar bagi masyarakat. Beragam adegan serta dialog di dalamnya mampu memengaruhi emosi penonton sehingga ikut terlarut pada problematika yang ditampilkan. Dengan kata lain, sesuai dengan fungsi media massa, film berfungsi untuk memberikan hiburan, edukasi, dan inspirasi bagi penontonnya.

"*The Years of Living Dangerously*" merupakan film bergenre dokumenter yang berusaha mengungkapkan fakta-fakta terkait masalah perubahan iklim di bumi secara menyeluruh. Indonesia, sebagai salah satu negara yang dijuluki paru-

paru dunia karena luas hutannya, secara ironis mendapat sorotan dalam film ini akibat turut menyumbang ketidakstabilan alam melalui kerusakan-kerusakan pada hutannya. Pembukaan lahan hutan secara besar-besaran yang terjadi di Kalimantan dikupas mendalam pada dokumenter ini. Harrison Ford sebagai tim peneliti diceritakan mendatangi Indonesia untuk mencari tahu seluk beluk permasalahan perhutanan di dalamnya.

Melalui "*The Years of Living Dangerously*", bentuk komunikasi lingkungan di Indonesia terangkat ke permukaan perfilman dunia. Menteri Perhutanan saat itu, Zulkifli Hasan dan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono muncul sebagai narasumber di beberapa *scene* di film ini. Selain itu banyak aktifis dan warga Indonesia yang juga menjadi narasumber. Konteks komunikasi lingkungan dirasa sangat tepat untuk dibahas di dalam penelitian ini.

Sebagai media komunikasi massa, film ini tidak terlepas dari teori konstruksi realitas, di mana sebuah realitas dibangun dengan cara-cara tertentu untuk menghasilkan paradigma atau gagasan tertentu. Komunikasi Lingkungan di Indonesia terbingkai dalam film *The Years of Living Dangerously* yang tayang di beberapa negara. Melalui film ini, citra Indonesia akan dinilai secara subjektif oleh orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Penelitian ini akan membongkar bagaimana film *The Years of Living Dagnerously* membingkai wajah komunikasi lingkungan di Indonesia.

1.2 FOKUS PENELITIAN DAN PERTANYAAN PENELITIAN

Seperti telah dijelaskan pada konteks penelitian di atas, dapat dirumuskan sebuah masalah pada penelitian ini yakni: “Bagaimana Konstruksi Komunikasi Lingkungan di Indonesia pada Film *The Years of Living Dangerously?*”. Penelitian ini menggunakan metode analisis *framing* karena teks media tidak lain merupakan hasil konstruksi dari realitas. Pembingkai atau *framing* ialah salah satu cara untuk mengkonstruksi realitas. Metode analisis *framing* dari William A. Gamson digunakan untuk membongkar bagaimana film ini membingkai permasalahan komunikasi lingkungan khususnya deforestasi di Indonesia.

Adapun pertanyaan utama dari penelitian ini ialah:

1. Bagaimana komunikasi lingkungan di Indonesia pada film “*The Years of Living Dangerously?*” ditinjau dari *Frame Central Idea*?
2. Bagaimana komunikasi lingkungan di Indonesia pada film “*The Years of Living Dangerously?*” ditinjau dari perangkat *Framing Devices*?
3. Bagaimana komunikasi lingkungan di Indonesia pada film “*The Years of Living Dangerously?*” ditinjau dari perangkat *Reasoning Devices*?
4. Bagaimana komunikasi lingkungan di Indonesia dibingkai secara keseluruhan dalam film “*The Years of Living Dangerously?*”?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui komunikasi lingkungan di Indonesia pada film “*The Years of Living Dangerously?*” ditinjau dari *Frame Central Idea*.
2. Mengetahui komunikasi lingkungan di Indonesia pada film “*The Years of Living Dangerously?*” ditinjau dari perangkat *Framing Devices*?

3. Mengetahui komunikasi lingkungan di Indonesia pada film “*The Years of Living Dangerously*” ditinjau dari perangkat *Reasoning Devices*?
4. Mengetahui bagaimana komunikasi lingkungan di Indonesia dibingkai secara keseluruhan dalam film “*The Years of Living Dangerously*”?

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

- **Kegunaan Penelitian Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, terutama untuk menumbuhkan kesadaran bahwa segala bentuk teks media merupakan hasil konstruksi yang dibuat oleh media itu sendiri. Selain itu, penelitian ini juga dibuat untuk membuktikan bahwa media membingkai ulang kontennya karena teks media merupakan hasil konstruksi media terhadap realitas.

Kemudian, biarpun dalam lingkup yang tidak begitu besar, penelitian ini juga diharapkan agar dapat secara kolektif membantu perkembangan industri film di Indonesia dengan cara menumbuhkan minat pembaca akan hadirnya produksi film yang tidak hanya menghibur namun juga dapat mengedukasi.

- **Kegunaan Penelitian Teoritis**

Sementara itu, secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memperlihatkan bagaimana cara sutradara menyampaikan gagasannya tentang komunikasi lingkungan di Indonesia kepada masyarakat melalui aspek-aspek *framing devices*, seperti *methaphors*, *catchphrases*, *exemplar*, *depiction*, dan *visual image*, serta

aspek-aspek *reasoning devices*, seperti *roots*, *appeal to principle*, dan *consequences*.

1.5 SETTING PENELITIAN

Film *The Years of Living Dangerously* merupakan salah satu produk komunikasi lingkungan berupa teks media. Banyak film yang membahas perihal kerusakan lingkungan dengan sangat baik dan dapat menjelaskan bagaimana lingkungan di sekitar kita ini bekerja. Namun film *The Years of Living Dangerously* membahas lingkungan dari perspektif permasalahan sosial. Film ini memperlihatkan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan lingkungan hidupnya melalui peraturan formal dan budaya yang dianut. Dari situ terlihat bahwa kerusakan lingkungan merupakan bagian dari permasalahan sosial yang memerlukan komunikasi secara strategis dan terencana untuk memperbaikinya.

Penelitian ini dibatasi pada teks verbal (dialog) dan data gambar (visual) dalam film "*The Years of Living Dangerously*" yang digunakan sebagai data pendukung penelitian. Film ini diproduksi oleh Showcase, yaitu perusahaan TV kabel dari Amerika, yang mengambil latar belakang di beberapa tempat dengan fokus masalah pencemaran iklim global, seperti deforestasi di Indonesia dan Amerika Barat, kekeringan di Amerika Selatan dan Afghanistan, serta lain sebagainya.

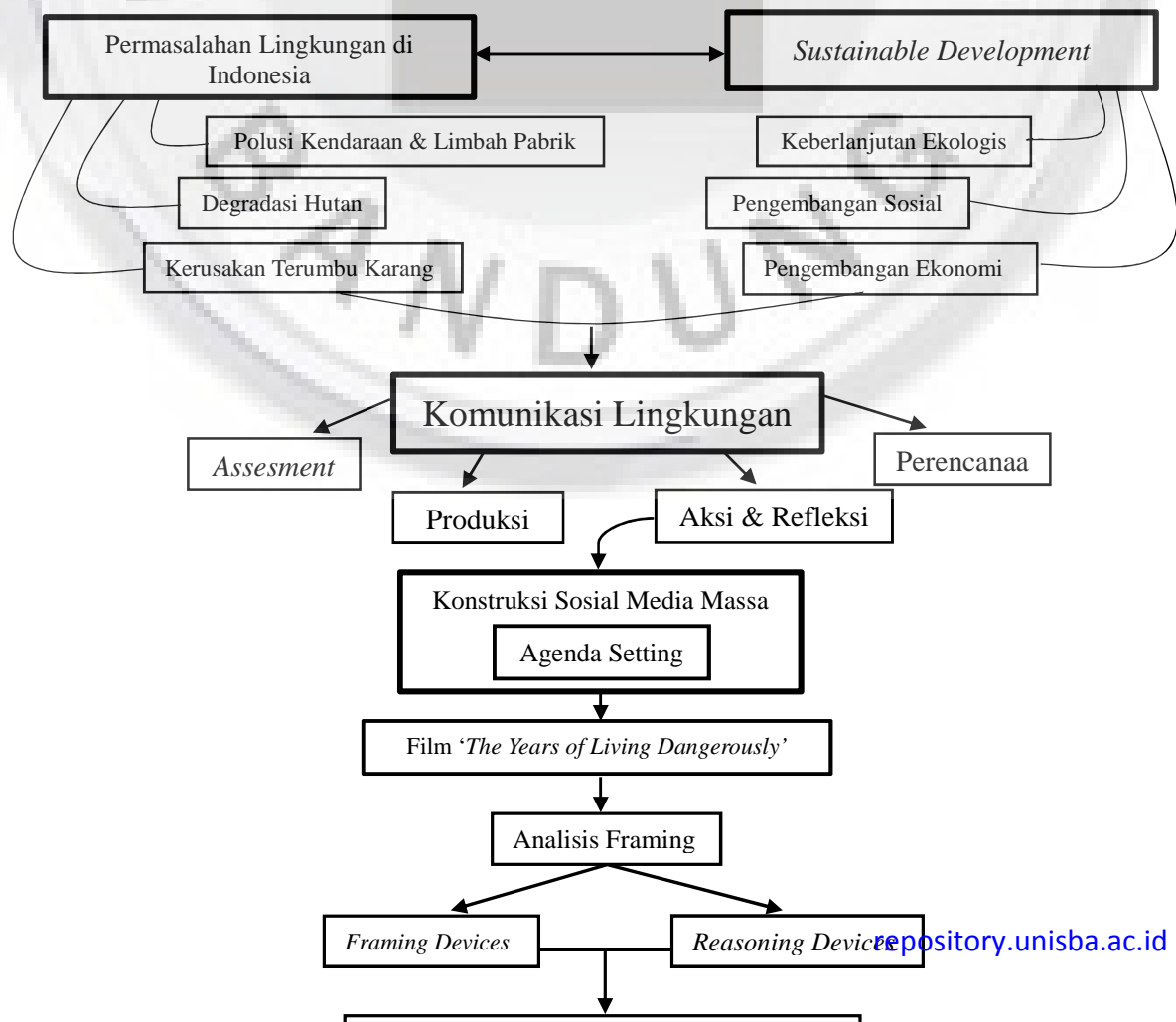
Permasalahan yang diteliti menyangkut komunikasi lingkungan Indonesia yang terkonstruksi dalam film "*The Years of Living Dangerously*" episode 1 dan 2

yang dibahas mendalam oleh sutradara melalui peran Harrison Ford sebagai narator sekaligus jurnalis pada film tersebut. *Scene-scene* yang akan diteliti dari film ini memperlihatkan bagaimana Harrison Ford mendatangi tokoh-tokoh penting yang berkecimpung dalam permasalahan lingkungan terkait deforestasi yang terjadi di Indonesia.

1.6 KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini merupakan turunan dari permasalahan komunikasi lingkungan yang terjadi di Indonesia, khususnya mengenai deforestasi dan degradasi hutan. Permasalahan tersebut terbingkai dalam film “*The Years of Living Dangerously*” di mana Indonesia menjadi subjek yang dibahas secara mendalam. Berikut adalah diagram skema penelitian yang digunakan:

Gambar 1.1
Skema Penelitian



Indonesia ialah salah satu negara yang memiliki keanekaragaman fauna dan hayati terkaya di dunia. Namun, tercatat bahwa di Indonesia juga terdapat berbagai permasalahan yang mengancam eksistensi keragaman sumber daya alam tersebut. Kerusakan telah terjadi pada 1,9 juta hektar wilayah daratan dan 3,2 juta wilayah lautan di Indonesia. Menurut survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 40% keadaan terumbu karang di Indonesia telah rusak dan hanya 6,5% yang keadaannya baik. Padahal, fungsi terumbu karang mirip dengan hutan, yaitu sebagai tempat tinggal berbagai makhluk hidup, juga penyerap unsur karbon dioksida. Di samping itu, kondisi perhutanan Indonesia—seperti dipaparkan sebelumnya—juga mengalami kerusakan parah. Hal ini terlihat dari berkurangnya jumlah lahan perhutanan setiap tahunnya.

Degradasi ini kerap diakibatkan oleh konversi lahan hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dan persawahan. Selain itu, kegiatan para pembalak kayu ilegal atau *illegal logging* juga menjadi ancaman besar. Hutan di area Taman Nasional Tesso Nilo banyak berkurang karena dua aktivitas tersebut. Perusakan lahan hutan ini berdampak pada kehidupan manusia. Contohnya, penggundulan hutan bakau di Aceh dianggap pula sebagai salah satu penyebab dari tingginya jumlah korban tsunami pada 2004 silam. Seharusnya, hutan bakau dapat meminimalisir gelombang tsunami yang mencapai area pemukiman warga.

Tahun 2007, *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) menggelar konferensi di Bali dengan tema *Bali Roadmap*. Bahasan utama dalam konferensi ini ialah perihal program REDD atau *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* yang secara garis besar bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui peningkatan kualitas hutan secara global. Ide ini pertama kali digagas melalui konferensi *Kyoto Protocol* oleh UNFCCC pada 1992, dengan cara mengadakan perdagangan emisi antara negara industri yang dibebani kewajiban pengurangan emisi karbon dengan negara berkembang yang tidak dibebani pengurangan emisi karbon. REDD diduga dapat menjadi sebuah alternatif pemberantas deforestasi yang memakan biaya paling murah. Selain itu, dalam konferensi *Bali Roadmap* juga disepakati agar pada 2020 emisi gas rumah kaca dapat berkurang sebanyak 10-40%. Hasil konferensi ini menjadi perhatian khusus bagi Indonesia untuk terus menanggulangi permasalahan lingkungan yang dimilikinya. Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki kuantitas hutan dalam jumlah besar, dianggap sebagai negara yang dapat menjembatani komunikasi antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Untuk membangun pola komunikasi yang ideal, diperlukan efektifitas strategi yang menunjang.

Kurniawati (2013: 478) mengutip dari *Applying Communication Tools toward Sustainable Development* mengatakan bahwa strategi komunikasi lingkungan yang efektif akan melalui 4 tahap. Pertama, tahap *assesment* yang terdiri dari proses analisis situasi masalah serta aktor terkait. Kedua, tahap perencanaan dengan melibatkan partisipasi dari grup-grup yang bersangkutan.

Dalam tahap kedua ini, peran media massa akan ditentukan karakteristiknya. Ketiga, tahap produksi di mana teks media dirancang serta diuji coba. Keempat, tahap aksi dan refleksi di mana produk berupa teks media mulai ditampilkan sekaligus dievaluasi.

Berdasarkan pendapat Tamburaka (2012: 22-23), media massa memiliki agenda yang dapat menggiring kesadaran publik terhadap isu-isu yang dirasa penting oleh media massa tersebut. Media bukanlah suatu saluran yang bebas, tetapi juga menjadi subjek yang mengkonstruksi realitas. Media merupakan agen konstruksi sosial yang mampu menyatakan argumennya melalui berita-berita dan teks-teks yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar. Media menafsirkan realitas yang dipilihnya untuk disajikan kepada khalayak dengan cara mendefinisikan peran para aktor dan peristiwa, lalu membingkainya dan menentukan bagaimana khalayak akan memahami konstruksi atas realitas tersebut.

Sebagai salah satu produk media massa, di dalam film terdapat seorang sutradara yang berperan selaku komunikator. Sutradara ini tentunya memiliki agenda atau gagasan yang ingin ia sampaikan dengan cara mempertunjukkan film hasil karyanya kepada masyarakat luas. Dari agenda itu, timbul istilah “konstruksi sosial”. Sutradara mengonstruksi realitas sosial yang dipahaminya, lalu menyampaikannya kepada khalayak sesuai dengan agendanya tersebut. Menurut Hidayat (dalam Bungin, 2011: 3-4), kajian mengenai konstruksi sosial oleh media akan memperkuat paradigma konstruktivistik dalam realitas sosial.

Dalam paradigma konstruktivistik, terdapat istilah realitas simbolik yang berarti ekspresi simbolik dari realitas objektif dalam berbagai bentuk tertentu

(Berger dan Luckmann dalam Bungin, 2011: 5). Bahasa dan gambar ialah salah satu bentuk ekspresi simbolik dalam mengkonstruksi realitas objektif. Dalam sebuah film kita dapat menemukan konstruksi realitas berupa bahasa sekaligus visual.

Film seringkali mengangkat beragam isu, salah satunya ialah isu perusakan lingkungan. Dengan kata lain, film dapat disebut sebagai salah satu komunikator lingkungan yang mampu mendukung pembangunan berbasis kelestarian alam. Film fiksi juga seringkali menyinggung permasalahan lingkungan biarpun dalam porsi yang kecil. Misalnya, adegan dari film "*Lord of the Ring*" ketika pohon menjadi hidup dan marah saat pasukan *troll* menebangi hutan untuk perluasan lahan kerajaan. Adegan film fiksi seringkali meninggalkan kesan yang mendalam karena melalui sifat imajinatifnya dapat membangkitkan kesadaran penonton. Berbeda dengan film fiksi, kesadaran penonton dalam film dokumenter dibangun melalui informasi berdasarkan data-data faktual.

The Years of Living Dangerously ialah film bergenre dokumenter yang bercerita tentang perubahan iklim secara global. Secara garis besar film ini menjelaskan bahwa perubahan iklim terjadi karena perilaku manusia yang cenderung merusak alam. Pencemaran lingkungan terjadi melalui berbagai cara sebagaimana perilaku manusia yang begitu variatif. Contohnya polusi kendaraan bermotor, limbah pabrik, *illegal logging*, konversi lahan perhutanan, peperangan, dan lain-lain. Film *The Years of Living Dangerously* mengangkat permasalahan lingkungan yang terjadi di berbagai negara, salah satunya kondisi perhutanan Indonesia yang terdegradasi.

Kondisi perhutanan Indonesia rusak akibat seringnya terjadi alih fungsi dan pembukaan lahan hutan menjadi area industri yang dapat menguntungkan secara finansial. Film *The Years of Living Dangerously* menjelaskan bagaimana politikus korup dan pengusaha kaya mendominasi kekuasaan atas lahan perhutanan di Indonesia. Secara keseluruhan, film ini memaparkan kepada khalayak tentang kondisi perusakan hutan di Indonesia dan siapa yang dapat bertanggung jawab atas rusaknya lahan hutan tersebut. Sebagai produk komunikasi lingkungan, film *The Years of Living Dangerously* ini turut membongkai bagaimana proses komunikasi lingkungan di Indonesia dalam mengatasi permasalahan deforestasi.

Framing adalah sebuah strategi yang menunjukkan bagaimana realitas atau dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak (Sudibyo dalam Sobur, 2012: 161). Realitas sosial dikonstruksikan ke dalam sebuah film melalui pembingkai atau *framing*. Penonton film akan mempersepsikan realitas sosial melalui pembingkai tersebut. Dengan kata lain, media dapat menggiring persepsi khalayak media. Oleh karena itu, analisa konstruksi komunikasi lingkungan dalam film *The Years of Living Dangerously* dapat diuraikan menggunakan metode analisis *framing*.

Model analisis *framing* William A. Gamson dirasa tepat untuk membongkar bingkai komunikasi lingkungan di Indonesia dalam film *The Years of Living Dangerously*. Model ini membagi *framing central idea* ke dalam dua aspek yaitu *framing devices* dan *reasoning devices*. Di mana *framing devices* merupakan cara media melihat suatu isu dan *reasoning devices* ialah cara media membenarkan

suatu isu (Sobur, 2012: 179). Kedua aspek tersebut membangun *framing central idea* atau ide utama yang membangun pengertian terhadap makna dari suatu isu.

Di dalam film *The Years of Living Dangerously* terdapat pemahaman tentang permasalahan deforestasi yang terjadi di Indonesia. Untuk membongkar makna yang terbingkai dalam film tersebut dibutuhkan proses analisis secara mendalam melalui sebuah penelitian. Penelitian yang berbicara tentang komunikasi lingkungan dalam film *The Years of Living Dangerously* akan menganalisa bagaimana aspek-aspek *framing central idea* yang terdapat dalam film ini membangun pemahaman tentang permasalahan deforestasi yang terjadi di Indonesia.